

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Harus Diaudit Inspektorat dan KPK

DPRD DKI Jakarta meminta agar Inspektorat dan KPK Pemprov DKI Jakarta segera melakukan audit. Khususnya terhadap proyek pengelolaan taman di ibu kota. Pasalnya, anggaran yang mencapai Rp140 miliar itu diduga kurang transparan.

"Saat ini eranya era keterbukaan

dan transparansi. Jadi bila ada anggaran besar hanya untuk pengelolaan taman, ya harus transparan. Oleh sebab itu inspektorat dan KPK harus mengaudit," ujar Hardianto Kenneth, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta kepada wartawan di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/9).

Sebab, kata Hardianto, dirinya mendengar pada periode lalu soal pembangunan pos dan toilet di 20 taman di Jaksel yang menghabiskan anggaran hingga Rp 1,2 miliar. Ternyata, banyak fasilitasnya hingga saat ini

tidak bisa difungsikan dan bahkan terbengkalai.

"Proyek yang ada itu saya kira perlu dilakukan audit. Makanya saya minta inspektorat dan KPK Pemprov DKI harus segera melakukan audit menyeluruh," tegas dia ■

Menurut dia, dikhawatirkan selain proyek mubazir lantaran tidak bisa langsung difungsikan, juga ada beberapa pembangunan pos dan toilet serta taman mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Di antaranya pembangunan pos dan toilet di Taman Palapa, Pasar Minggu serta di Taman Kura-kura, Kebayoran Baru.

Seharusnya, sambung Hardianto, dalam saat perencanaan Sudin Kehutanan meminta pendapat masyarakat setempat dahulu dalam hal pembangunan pos dan toilet tersebut. Kemudian, saat inipula banyak terlihat taman-taman tak terurus. Padahal anggaran pengelolaannya cukup besar.

Dia menambahkan, bila telah terbentuk AKD, pihaknya akan mengusulkan Komisi D yang memiliki tupoksi tersebut untuk memanggil Sudin Kehutanan. "Nanti bila AKD telah terben-

tuk akan diusulkan pemanggilan kepada pihak Pemrov DKI," imbuh dia.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo mengatakan hal senada. "Yang pertama transparansi anggaran, agar publik dapat mengamati proses penganggaran," ujar dia.

Anthony menyebut, selama ini masyarakat kesulitan mendapat salinan anggaran. Biasanya, di website Pemprov DKI tidak tersedia. Dia berjanji, ketika kader PSI mulai bekerja, masyarakat bakal mudah mendapatkan salinan anggaran. "Terutama soal pengelolaan taman di DKI ini," tandas dia.

Anthony berjanji, PSI bakal memelototi fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum. Fasilitas harus memudahkan kaum disabilitas, orang tua dan ibu hamil serta menyusui. "Akan kita pastikan di jalan, ramah disabilitas nggak. Di kantor-kantor ada ruang menyusui nggak," tutur dia. (aen)